

SEJARAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pada Tanggal 13 April 1964, Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk. Dalam usianya yang menginjak lebih setengah abad ini, banyak peristiwa penting mewarnai sejarah perjalanan provinsi ini. Bagi orang bijak, sejarah pada masalah merupakan sumber inspirasi untuk saat sekarang dan saat yang akan datang. Dengan memahami sejarah, tindakan kepahlawanan dan peristiwa gemilang pada masa lalu diharapkan menjadi sumber inspirasi untuk mencetuskan peristiwa besar pula. Sejarah tersebut di antaranya seperti yang diuraikan berikut ini.

Pada abad ke 13, di Sulawesi Tengah sudah berdiri beberapa kerajaan seperti Kerajaan Banawa, Kerajaan Tawaeli, Kerajaan Sigi, Kerajaan Bangga, dan Kerajaan Banggai. Pengaruh Islam ke kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah mulai terasa pada abad ke 16. Penyebaran Islam di Sulawesi Tengah ini merupakan hasil dari ekspansi kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Pengaruh yang mula-mula datang adalah dari Kerajaan Bone dan Kerajaan Wajo. Pengaruh Sulawesi Selatan begitu kuat terhadap Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Tengah, bahkan sampai pada tata pemerintahan. Struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah akhirnya terbagi dua, yaitu, yang berbentuk Pitunggota dan lainnya berbentuk Patanggota. Pitunggota adalah suatu lembaga legislatif yang terdiri dari tujuh anggota dan diketuai oleh seorang Baligau. Struktur pemerintahan ini mengikuti susunan pemerintahan ala Bone dan terdapat di Kerajaan Banawa dan Kerajaan Sigi. Struktur lainnya, yaitu, Patanggota, merupakan pemerintahan ala Wajo dan dianut oleh Kerajaan Palu dan Kerajaan Tawaeli. Patanggota Tawaeli terdiri dari Mupabomba, Lambara, Mpanau, dan Baiya. Pengaruh lainnya adalah datang dari Mandar. Kerajaan-kerajaan di Teluk Tomini adalah cikal bakalanya berasal dari Mandar. Pengaruh Mandar lainnya adalah dengan dipakainya istilah raja. Sebelum pengaruh ini masuk, di Teluk Tomini hanya dikenal gelar Olongian atau tuan-tuan tanah yang secara otonom menguasai wilayahnya masing-masing. Selain pengaruh Mandar, kerajaan-kerajaan di Teluk Tomini juga dipengaruhi Gorontalo dan Ternate. Hal ini terlihat dalam struktur pemerintahannya yang sedikit banyak mengikuti struktur pemerintahan di Gorontalo dan Ternate tersebut. Struktur pemerintahan tersebut terdiri dari Olongian (kepala negara), Jogugu (perdana menteri), Kapitan Laut (Menteri Pertahanan), Walaapulu (menteri keuangan), Ukum (menteri perhubungan), dan Madinu (menteri penerangan)

Dengan meluasnya pengaruh Sulawesi Selatan, menyebar pula agama Islam. Daerah-daerah yang diwarnai Islam pertama kali adalah daerah pesisir. Pada pertengahan abad ke 16, dua kerajaan, yaitu Buol dan Luwuk telah menerima ajaran Islam. Sejak tahun 1540, Buol telah berbentuk kesultanan dan dipimpin oleh seorang sultan bernama Eato Mohammad Tahir. Mulai abad ke 17, wilayah Sulawesi Tengah mulai masuk dalam kekuasaan kolonial Belanda. Dengan dalih untuk mengamankan armada kapalnya dari serangan bajak laut, VOC membangun benteng di Parigi dan Lambunu. Pada abad ke 18, meningkatkan tekanannya pada raja-raja di Sulawesi Tengah. Mereka memanggil raja-raja Sulawesi Tengah untuk datang ke Manado dan Gorontalo

untuk mengucapkan sumpah setia kepada VOC. Dengan begitu, VOC berarti telah menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah tersebut. Permulaan abad ke 20, dengan diikat suatu perjanjian bernama *lang contract* dan *korte verklaring*, Belanda telah sepenuhnya menguasai Sulawesi Tengah. Terhadap kerajaan yang membangkang, Belanda menumpasnya dengan kekerasan senjata. Pada permulaan abad ke 20 pula mulai muncul pergerakan-pergerakan yang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Selain pergerakan lokal, masuk pula pergerakan-pergerakan yang berpusat di Jawa. Organisasi yang pertama mendirikan cabang di Sulawesi Tengah adalah Syarikat Islam (SI), didirikan di Buol Toli-Toli tahun 1916. Organisasi lainnya yang berkembang di wilayah ini adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang cabangnya didirikan di Buol tahun 1928. organisasi lainnya yang membuka cabang di Sulawesi Tengah adalah Muhammadiyah dan PSII. Perlawanan rakyat mencapai puncaknya tanggal 25 Januari 1942. Para pejuangnya dipimpin oleh I.D. Awuy menangkap para tokoh kolonial seperti Controleur Toli-Toli De Hoof, Bestuur Asisten Residen Matata Daeng Masese, dan Controleur Buol de Vries. Dengan tertangkapnya tokoh-tokoh kolonial itu, praktis kekuasaan Belanda telah diakhiri. Tanggal 1 Februari 1942, sang merah putih telah dikibarkan untuk pertama kalinya di angkasa Toli-Toli. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama karena seminggu kemudian pasukan Belanda kembali datang dan melakukan gempuran. Meskipun telah melakukan gempuran, Belanda tidak sempat berkuasa kembali di Sulawesi Tengah karena pada waktu itu, Jepang mendarat di wilayah itu, tepatnya di Luwuk tanggal 15 Mei 1942. dalam waktu singkat Jepang berhasil menguasai wilayah Sulawesi Tengah. Di era Jepang, kehidupan rakyat semakin tertekan dan sengsara seluruh kegiatan rakyat hanya ditujukan untuk mendukung peperangan Jepang. Keadaan ini berlangsung sampai Jepang menyerah kepada Sekutu dan disusul dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia

Pada awal kemerdekaan, Sulawesi Tengah merupakan bagian dari provinsi Sulawesi. Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, pasca kemerdekaan adalah saatnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Rongrongan terus datang dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Belanda menerapkan politik pecah-belah dimana Indonesia dijadikan negara serikat. Namun akhirnya bangsa Indonesia dapat melewati rongrongan itu dan pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Sejak saat itu, Sulawesi kembali menjadi salah satu provinsi di Republik Indonesia dan berlangsung hingga terjadi pemekaran tahun 1960. Pada tahun tersebut Sulawesi dibagi dua menjadi Sulawesi Selatan-Tenggara yang beribu kota di Makassar dan Sulawesi Utara-Tengah yang beribu kota di Manado. Pada tahun 1964, Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dimekarkan menjadi provinsi Sulawesi Utara yang beribu kota di Manado dan Sulawesi Tengah yang beribu kota di Palu. Pada tanggal 13 April 1964, untuk pertama kalinya diangkat Gubernur tersendiri Propinsi Sulawesi Tengah, sehingga tanggal ini pula diperingati sebagai hari ulang tahun propinsi ini hingga sekarang

PROFIL SULAWESI TENGAH

Sulawesi Tengah (disingkat Sulteng) adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Palu. Luas wilayahnya 61.841,29 km², dan jumlah penduduk sebanyak 2.985.734 jiwa (2020). Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi setelah provinsi Sulawesi Selatan

PENGARUH HINDIA BELANDA

Wilayah sepanjang pesisir barat Sulawesi Tengah, dari Kaili hingga Tolitoli, ditaklukkan oleh Kerajaan Gowa sekitar pertengahan abad ke-16 di bawah kepemimpinan Raja Tunipalangga. Wilayah di sekitar Teluk Palu merupakan pusat dan rute perdagangan yang penting, produsen minyak kelapa, dan pintu masuk ke pedalaman Sulawesi Tengah. Di sisi lain, daerah Teluk Tomini sebagian besar berada di bawah kekuasaan Kerajaan Parigi.

Pada tahun 1824, perwakilan Kerajaan Banawa dan Kerajaan Palu menandatangani *Korte Verklaring* (Perjanjian Pendek) dengan pemerintah kolonial. Kapal-kapal Belanda mulai sering berlayar di bagian selatan Teluk Tomini setelah tahun 1830.

Sulawesi Tengah baru benar-benar "diperhatikan" oleh Pemerintah Hindia Belanda pada periode tahun 1860-an. Seorang pejabat pemerintah bernama Johannes Cornelis Wilhelmus Diedericus Adrianus van der Wyck, berhasil mengunjungi Danau Poso pada tahun 1865 dan menjadi orang Eropa dan Belanda pertama yang melakukannya. Langkah ini diikuti oleh pejabat pemerintah lainnya, Willem Jan Maria Michielsen, pada tahun 1869. Wacana untuk menduduki wilayah ini ditolak dan merujuk kepada kebijakan anti-ekspansi yang dikeluarkan pemerintah kolonial pada zaman itu. Baru pada tahun 1888, sebagian besar wilayah ini mulai menjalin hubungan dengan pemerintah di Batavia melalui perjanjian pendek yang ditandatangani oleh para raja dan penguasa lokal, sebagai tindakan antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan tersebarnya pengaruh politik dan ekonomi Britania Raya di wilayah ini.

Pada periode tersebut, Sulawesi Tengah berada di bawah yurisdiksi Afdeling Gorontalo, yang berpusat di Gorontalo. G. W. W. C. Baron van Höevell, Asisten Residen Gorontalo, khawatir pengaruh Islam yang begitu kuat di Gorontalo akan meluas ke wilayah Sulawesi Tengah yang saat itu masih belum dimasuki agama samawi, dan penduduknya sebagian besar masih pagan, penganut animisme, dan memeluk agama suku. Baginya, agama Kristen adalah penyangga yang paling efektif melawan pengaruh Islam. Ia menghubungi lembaga misionaris Belanda, *Nederlandsch Zendeling Genootschap* (NZG), dan meminta mereka untuk menempatkan seorang misionaris di wilayah ini. Pada tahun 1892, NZG kemudian mengirimkan misionaris bernama Albertus Christiaan Kruyt, yang ditempatkan di Poso. Langkah ini dilanjutkan pada tahun 1894, ketika pemerintah mengangkat Eduard van Duyvenbode Varkevisser, sebagai Kontrolir atau pejabat pemerintah yang akan menjadi pengawas dan pemimpin wilayah di Poso.

PENAKLUKAN MILITER OLEH BELANDA

Penaklukan Belanda di Sulawesi Tengah dimulai dengan serangkaian serangan militer terhadap berbagai kerajaan lokal dan daerah. Pada tahun 1905, sebagian wilayah di Poso terlibat dalam pemberontakan gerilya melawan pasukan Belanda, sebagai bagian dari kampanye militer terkoordinasi Belanda ke seluruh daratan Sulawesi. Salah satu kampanye militer yang terkenal adalah "penaklukan" Kerajaan Mori dalam Perang Wulanderi yang terjadi pada tahun 1907.^[13]

Semenjak tahun 1905, wilayah Sulawesi Tengah seluruhnya jatuh ke tangan Pemerintahan Hindia Belanda, dari Tujuh Kerajaan di Timur dan Delapan Kerajaan di Barat, kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda dijadikan *Landschap-landschap* atau Pusat-pusat Pemerintahan Hindia Belanda yang meliputi, antara lain:

1. Poso Lage di Poso
2. Lore di Wanga, Lore Utara, Poso
3. Tojo di Ampana
4. Una-Una di Pulau Una-Una
5. Bungku di Bungku
6. Mori di Kolonedale
7. Banggai di Luwuk
8. Parigi di Parigi
9. Moutong di Tinombo
10. Tawaeli di Tawaeli
11. Banawa di Donggala
12. Palu di Palu
13. Sigi/Dolo di Biromaru
14. Kulawi di Kulawi
15. Tolitoli di Tolitoli

ZAMAN KEMERDEKAAN

Dalam perkembangannya, ketika Pemerintahan Hindia Belanda jatuh dan sudah tidak berkuasa lagi di Sulawesi Tengah serta seluruh Indonesia, Pemerintah Pusat kemudian membagi wilayah Sulawesi Tengah menjadi 3 (tiga) bagian, yakni:

1. Sulawesi Tengah bagian Barat, meliputi wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Tolitoli. Pembagian wilayah ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Sulawesi Tengah bagian Tengah (Teluk Tomini), masuk Wilayah Karesidenan Sulawesi Utara di Manado. Pada tahun 1919, seluruh

Wilayah Sulawesi Tengah masuk Wilayah Karesidenen Sulawesi Utara di Manado. Pada tahun 1940, Sulawesi Tengah dibagi menjadi 2 Afdeeling yaitu Afdeeling Donggala yang meliputi Tujuh Onder Afdeeling dan Lima Belas Swapraja.

3. Sulawesi Tengah bagian Timur (Teluk Tolo) masuk Wilayah Karesidenen Sulawesi Timur Bau-bau.

Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Tolitoli. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang otonom berdiri sendiri yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan selanjutnya tanggal pembentukan tersebut diperingati sebagai Hari Lahirnya Provinsi Sulawesi Tengah.

ZAMAN REFORMASI

Dengan perkembangan Sistem Pemerintahan dan tutunan Masyarakat dalam era Reformasi yang menginginkan adanya pemekaran Wilayah menjadi Kabupaten, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan. Kemudian melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 oleh Pemerintah Pusat terbentuk lagi 2 Kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tojo Una-Una. Setelah pemekaran beberapa wilayah kabupaten, provinsi ini terbagi menjadi 14 daerah, yaitu 13 kabupaten dan 1 kota.

Ibu kota Sulawesi Tengah adalah Palu. Kota ini terletak di Teluk Palu dan terbagi dua oleh Sungai Palu yang membujur dari Lembah Palu dan bermuara di laut.

GEOGRAFI

Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah bagian utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Maluku, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, bagian tenggara berbatasan dengan Sulawesi Tenggara, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar

HIDROGRAFI

Sulawesi Tengah juga memiliki beberapa sungai, di antaranya sungai Lariang yang terkenal sebagai arena arung jeram, sungai Gumbasa dan sungai Palu. Juga terdapat danau yang menjadi objek wisata terkenal yakni Danau Poso dan Danau Lindu.

Sulawesi Tengah memiliki beberapa kawasan konservasi seperti suaka alam, suaka margasatwa dan hutan lindung yang memiliki keunikan flora dan fauna yang sekaligus menjadi objek penelitian bagi para ilmuwan dan naturalis.

IKLIM

Garis khatulistiwa yang melintasi semenanjung bagian utara di Sulawesi Tengah membuat iklim daerah ini tropis. Akan tetapi berbeda dengan Jawa dan Bali serta sebagian pulau Sumatra, musim hujan di Sulawesi Tengah antara bulan April dan September sedangkan musim kemarau antara Oktober hingga Maret. Rata-rata curah hujan berkisar antara 800 sampai 3.000 milimeter per tahun yang termasuk curah hujan terendah di Indonesia.

Temperatur berkisar antara 25 sampai 31° Celsius untuk dataran dan pantai dengan tingkat kelembaban antara 71 sampai 76%. Di daerah pegunungan suhu dapat mencapai 16 sampai 22° Celsius.

FLORA DAN FAUNA

Sulawesi merupakan zona perbatasan unik di wilayah Asia Oceania, di mana flora dan faunanya berbeda jauh dengan flora dan fauna Asia yang terbentang di Asia dengan batas Kalimantan, juga berbeda dengan flora dan fauna Oceania yang berada di Australia hingga Papua dan Pulau Timor. Garis maya yang membatasi zona ini disebut *Wallace Line*, sementara kekhasan flora dan faunanya disebut *Wallacea*, karena teori ini dikemukakan oleh Wallace seorang peneliti Inggris yang turut menemukan teori evolusi bersama Darwin.

Sulawesi memiliki flora dan fauna tersendiri. Binatang khas pulau ini adalah anoa yang mirip kerbau, babirusa yang berbulu sedikit dan memiliki taring pada mulutnya, tersier, monyet tonkena Sulawesi, kuskus marsupial Sulawesi yang berwarna-warni yang merupakan varitas binatang berkantung serta burung maleo yang bertelur pada pasir yang panas.

Hutan Sulawesi juga memiliki ciri tersendiri, didominasi oleh kayu agatis yang berbeda dengan Sunda Besar yang didominasi oleh pinang-pinangan (spesies *rhododendron*). Variasi flora dan fauna merupakan objek penelitian dan pengkajian ilmiah. Untuk melindungi flora dan fauna, telah ditetapkan taman nasional dan suaka alam seperti Taman Nasional Lore Lindu, Cagar Alam Morowali, Cagar Alam Tanjung Api dan terakhir adalah Suaka Margasatwa di Bangkiriang.

DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada tahun 2010 adalah 2.831.283 jiwa, dengan kepadatan 46 jiwa/km². Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di provinsi Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah penduduk 449.157 jiwa, sedangkan Kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Palu sebanyak 362.202 jiwa. Laju

pertumbuhan penduduk adalah 1,95% per tahun (2010). Sementara penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang tinggal di daerah pemukiman dan pedalaman ialah sekitar 30%, daerah pesisir 60%, dan kawasan kepulauan ialah 10%.

Pertanian merupakan sumber utama mata pencaharian penduduk dengan padi sebagai tanaman utama. Kopi, Kelapa, Kakao dan Cengkih merupakan tanaman perdagangan unggulan daerah ini dan hasil hutan berupa rotan, beberapa macam kayu seperti agatis, ebony dan meranti yang merupakan andalan Sulawesi Tengah.

Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan diketuai oleh ketua adat disamping pimpinan pemerintahan seperti Kepala Desa. Ketua adat menetapkan hukum adat dan denda berupa kerbau bagi yang melanggar. Umumnya masyarakat yang jujur dan ramah sering mengadakan upacara untuk menyambut para tamu seperti persembahan ayam putih, beras, telur serta tuak yang difermentasikan dan disimpan dalam bambu.

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK
1	1970	913.662
2	1980	1.289.662
3	1990	1.711.327
4	1995	1.938.071
5	2000	2.218.435
6	2010	2.635.009
7	2020	2.985.734

ETNIS

Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 15 kelompok etnis atau suku, yaitu:

1. Etnis Kaili berdiam di kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Sigi dan kota Palu
2. Etnis Kulawi berdiam di kabupaten Sigi
3. Etnis Lore berdiam di kabupaten Poso
4. Etnis Pamona berdiam di kabupaten Poso
5. Etnis Mori berdiam di kabupaten Morowali
6. Etnis Bungku berdiam di kabupaten Morowali
7. Etnis Saluan atau Loinang berdiam di kabupaten Banggai
8. Etnis Balantak berdiam di kabupaten Banggai
9. Etnis Mamasa berdiam di kabupaten Banggai
10. Etnis Taa berdiam di kabupaten Banggai
11. Etnis Bare'e berdiam di Kabupaten Parigi Moutong, Poso, dan Tojo Una-Una
12. Etnis Banggai berdiam di Banggai Kepulauan
13. Etnis Buol mendiami kabupaten Buol
14. Etnis Tolitoli berdiam di kabupaten Tolitoli
15. Etnis Tomini mendiami kabupaten Parigi Moutong

16. Etnis Dampal berdiam di Dampal, kabupaten Tolitoli
17. Etnis Dondo berdiam di Dondo, kabupaten Tolitoli
18. Etnis Pendau berdiam di kabupaten Tolitoli
19. Etnis Dampelas berdiam di kabupaten Donggala

Di samping 13 kelompok etnis, ada beberapa suku hidup di daerah pegunungan seperti suku Da'a di Donggala dan Sigi, suku Wana di Morowali, suku Seasea dan Suku Taa di Ampana dan Banggai, dan suku Daya di Buol Tolitoli. Meskipun masyarakat Sulawesi Tengah memiliki sekitar 22 bahasa yang saling berbeda antara suku yang satu dengan yang lainnya, namun masyarakat dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar sehari-hari.

Selain penduduk asli, Sulawesi Tengah dihuni pula oleh transmigran seperti dari Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Suku pendatang yang juga banyak mendiami wilayah Sulawesi Tengah adalah Mandar, Bugis, Makasar dan Toraja serta etnis lainnya di Indonesia sejak awal abad ke 19 dan sudah membaur

BAHASA

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Sulawesi Tengah adalah bahasa Indonesia. Hingga 2019, Badan Bahasa mencatat ada 21 bahasa daerah yang dipertuturkan di Sulawesi Tengah. Kedua puluh satu bahasa tersebut adalah:

1. Bahasa Bada, terdiri dari 2 dialek, yaitu dialek Napu dan dialek Bada Tiara. Bahasa Bada dituturkan di Kabupaten Poso yaitu dialek Napu, sedangkan dialek Bada Tiara dituturkan di Kabupaten Parigi Moutong.
2. Bahasa Bajo, dituturkan oleh masyarakat di daerah Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Tolitoli Utara, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara. Selain di Sulawesi Tengah, bahasa Kaili juga dipertuturkan di Gorontalo, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.
3. Bahasa Balaesang
4. Bahasa Balantak
5. Bahasa Banggai
6. Bahasa Besoa
7. Bahasa Bugis
8. Bahasa Bungku
9. Bahasa Buol
10. Bahasa Dondo
11. Bahasa Kaili
12. Bahasa Lauje Malala
13. Bahasa Moma
14. Bahasa Pamona

15. Bahasa Pipikoro
16. Bahasa Saluan
17. Bahasa Sangihe Talaud
18. Bahasa Seko
19. Bahasa Taa
20. Bahasa Tombatu
21. Bahasa Tomini
22. Bahasa Totoli

AGAMA

Penduduk Sulawesi Tengah sebagian besar memeluk agama Islam. Tercatat pada sensus tahun 2015, 76.37% penduduknya memeluk agama Islam, 16.58% memeluk agama Kristen Protestan, 4.45% memeluk agama Hindu, Katolik sebanyak 1.85%, serta Budha 0.74%. Islam disebarkan di Sulawesi Tengah oleh Datuk Karama dan Datuk Mangaji, ulama dari Sumatra Barat; yang kemudian diteruskan oleh Al Alimul Allamah Al-Habib As Sayyed Idrus bin Salim Al Djufri, seorang guru pada sekolah Alkhairaat dan juga diusulkan sebagai Pahlawan nasional.

Agama Kristen pertama kali disebarkan di kabupaten Poso dan bagian selatan Donggala oleh misionaris Belanda, A.C Cruyt dan Adrian. Meskipun masyarakat Sulawesi Tengah mayoritas beragama Islam, namun tingkat toleransi beragama sangat tinggi dan semangat gotong-royong yang kuat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

SENI DAN BUDAYA

Musik dan tarian di Sulawesi Tengah bervariasi antara daerah yang satu dengan lainnya. Musik tradisional memiliki instrumen seperti gong, kakula, lalove dan jimbe. Alat musik ini lebih berfungsi sebagai hiburan dan bukan sebagai bagian ritual keagamaan. Di wilayah beretnis Kaili sekitar pantai barat - waino - musik tradisional - ditampilkan ketika ada upacara kematian. Kesenian ini telah dikembangkan dalam bentuk yang lebih populer bagi para pemuda sebagai sarana mencari pasangan di suatu keramaian. Banyak tarian yang berasal dari kepercayaan keagamaan dan ditampilkan ketika festival.

Tari masyarakat yang terkenal adalah Dero yang berasal dari masyarakat Pamona, kabupaten Poso dan kemudian diikuti masyarakat Kulawi, kabupaten Donggala. Tarian dero khusus ditampilkan ketika musim panen, upacara penyambutan tamu, syukuran dan hari-hari besar tertentu. Dero adalah salah satu tarian di mana laki-laki dan perempuan berpegangan tangan dan membentuk lingkaran. Tarian ini bukan warisan leluhur tetapi merupakan kebiasaan selama pendudukan Jepang di Indonesia ketika Perang Dunia II. Tarian ini adalah tarian tradisional Sulawesi Tengah

KEBUDAYAAN

Sulawesi Tengah kaya akan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi yang menyangkut aspek kehidupan dipelihara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kepercayaan lama adalah warisan budaya yang tetap terpelihara dan dilakukan dalam beberapa bentuk dengan berbagai pengaruh modern serta pengaruh agama.

Karena banyak kelompok etnis mendiami Sulawesi Tengah, maka terdapat pula banyak perbedaan di antara etnis tersebut yang merupakan kekhasan yang harmonis dalam masyarakat. Mereka yang tinggal di pantai bagian barat kabupaten Donggala telah bercampur dengan masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan dan masyarakat Gorontalo. Di bagian timur pulau Sulawesi, juga terdapat pengaruh kuat Gorontalo dan Manado, terlihat dari dialek daerah Luwuk dan sebaran suku Gorontalo di kecamatan Bualemo yang cukup dominan.






Ada juga pengaruh dari Sumatra Barat seperti tampak dalam dekorasi upacara perkawinan. Kabupaten Donggala memiliki tradisi menenun kain warisan zaman Hindu. Pusat-pusat penenunan terdapat di Donggala Kodi, Watusampu, Palu, Tawaeli dan Banawa. Sistem tenun ikat ganda yang merupakan teknik spesial yang bermotif Bali, India dan Jepang masih dapat ditemukan.





Sementara masyarakat pegunungan memiliki budaya tersendiri yang banyak dipengaruhi suku Toraja, Sulawesi Selatan. Meski demikian, tradisi, adat, model pakaian dan arsitektur rumah berbeda dengan Toraja, seperti contohnya ialah mereka menggunakan kulit beringin sebagai pakaian penghangat badan. Rumah tradisional Sulawesi Tengah terbuat dari tiang dan dinding kayu yang beratap ilalang dan hanya memiliki satu ruang besar. Lobo atau duhunga merupakan ruang bersama atau aula yang digunakan untuk festival atau upacara, sedangkan Tambi merupakan rumah tempat tinggal. Selain rumah, ada pula lumbung padi yang disebut Gampiri.

Buya atau sarung seperti model Eropa hingga sepanjang pinggang dan keraba semacam blus yang dilengkapi dengan benang emas. Tali atau mahkota pada kepala diduga merupakan pengaruh kerajaan Eropa. Baju banjara yang disulam dengan benang emas merupakan baju laki-laki yang panjangnya hingga lutut. Daster atau sarung sutra yang membujur sepanjang dada hingga bahu, mahkota kepala yang berwarna-warni dan parang yang diselip di pinggang melengkapi pakaian adat. Senjata tradisional masyarakat Sulawesi Tengah adalah Parang (Guma), Tombak, Sumpit.

PEMERINTAHAN

No	Foto	Gubernur	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Wakil Gubernur
1		Anwar Gelar Datuk Madjo Basa Nan Kuning	13 April 1964	13 April 1968	<i>Tidak ada</i>
2		Mohammad Jasin	13 April 1968	April 1973	
3		Albertus Maruli Tambunan	April 1973	28 September 1978	
4		Moenafri	28 September 1978	22 Oktober 1979	
5		Eddy Djadjang Djajaatmadja	22 Oktober 1979	22 Oktober 1980	

—		Eddy Sabara (Penjabat Gubernur)	November 1980	Februari 1981	
6		Ghalib Lasahido	19 Desember 1981	Februari 1986	
7		Abdul Aziz Lamadjido	Februari 1986	Februari 1991	M. Soeleman
			Februari 1991	Februari 1996	
8		Bandjela Paliudju	16 Februari 1996	20 Februari 2001	Kiesman Abdullah
					Haryono
9		Aminuddin Ponulele	20 Februari 2001	20 Februari 2006	Rully Azis Lamadjido
—		Gumyadi (Penjabat Gubernur)	20 Februari 2006	24 Maret 2006	—

(8)		Bandjela Paliudju	24 Maret 2006	24 Maret 2011	Achmad Yahya
—		Rais Lamangkona (Pelaksana Harian Gubernur)	24 Maret 2011	31 Maret 2011	—
—		Tanribali Lamo (Penjabat Gubernur)	31 Maret 2011	16 Juni 2011	—
10		Longki Djanggola	16 Juni 2011	16 Juni 2016	Sudarto (2011–2016)
			16 Juni 2016	16 Juni 2021	Rusli Dg. Palabbi (2019–2021)
11		Rusdy Mastura	16 Juni 2021	<i>Petahana</i>	Ma'mun Amir

KAWASAN PELESTARIAN ALAM

Kawasan pelestarian alam meliputi taman nasional, taman hutan raya (tahura), dan taman wisata alam. Sulawesi Tengah memiliki beberapa kawasan taman nasional, yaitu:

- Taman Nasional Lore Lindu di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.
- Taman Nasional Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Una-Una.

BANDARA

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki beberapa bandar udara (bandara) yang beroperasi untuk penerbangan domestik dan internasional, Adapun daftar bandara yang ada di sulteng adalah sebagai berikut.

NO	NAMA BANDARA	KATEGORI	STATUS	ALAMAT	KAB/KOTA
1	Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie / PLW	Domestik	Kelas I	Jl. Abdul Rahman Saleh, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan	Kota Palu
2	Bandar Udara Kasiguncu / PSJ	Domestik	Kelas II	Jl. Trans Sulawesi KM 13 Kel.Kasiguncu, Kec. Poso Pesisir	Kabupaten Poso
3	Bandar Udara Sultan Bantilan / TLI	Domestik	Kelas III	Jl. Bandar Udara No. 13, Kel. Lalos, Kec. Galang	Kabupaten Tolitoli
4	Bandar Udara Pogogul / UDL	Domestik	Kelas III	Jl. Bandar Udara No. 1, Kel. Mangubi, Kec. Momunu	Kabupaten Buol
5	Bandar Udara Tanjung Api / VPM	Domestik	Satpel	Jl. Trans Sulawesi, Kel. Labuan, Kec. Ampana Kota	Kabupaten Tojo Una-una
6	Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir / LUW	Domestik	Kelas II	Jl. Mandapar No. 2 Desa Bubung, Kec. Luwuk Selatan	Kabupaten Banggai
7	Bandar Udara Maleo	Domestik	Satpel	Kel. Umbele, Kec. Bumi Raya	Kabupaten Morowali

LAMBANG DAERAH



Sesuai Perda Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 1969 tentang lambang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menguraikan beberapa hal sbb :

Pasal 1

Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

- 1) Dasar berbentuk jantung
- 2) Pohon kelapa dengan daun 5 helai dan buah 5 buah
- 3) Bintang bersegi lima
- 4) Padi dan kapas
- 5) Garis gelombang 2 buah
- 6) Tulisan Sulawesi Tengah di atas dasar lambang

Pasal 2

- 1) Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah pohon kelapa
- 2) Bentuk dari dasar Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah simbol jantung
- 3) Lambang daerah ini berukuran 40 x 60 atau perbandingan lebar dan panjang adalah 2:3
- 4) Warna dasar yang digunakan ada 2 macam yaitu biru langit dan kuning

Pasal 3

- 1) Pohon kelapa dilukiskan tegak di tengah-tengah lambang

Pasal 4

- 1) Gambar simbol jantung dibelah miring oleh garis simbol katulistiwa
- 2) Di atas garis miring dasar lambang berwarna biru langit dan dibawahnya berwarna kuning
- 3) Dibagian bawah dari pohon kelapa terlukis dua garis gelombang masing-masing dengan enam dan empat galur gelombang

Pasal 5

- 1) Pada bagian kiri dari gambar pohon kelapa terlukis padi yang berwarna kuning emas serta pada bagian kanannya terlukis buah kapas
- 2) Buah padi berjumlah 19 dan kapas berjumlah 13 dengan kelopak bergerigi 4

Pasal 6

Bagian pinggir atas dari jantung berwarna putih dengan tulisan “SULAWESI TENGAH” berwarna merah

Pasal 7

- 1) Cara penafsiran yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini yang tercantum dalam penjelasan umumnya tidak dibenarkan
- 2) Bentuk, warna dan ukuran Lambang Daerah ini adalah seperti terlukis pada lampiran Peraturan Daerah

Ambil file :

<https://www.jdih.sultengprov.go.id/>

https://www.jdih.sultengprov.go.id/peraturan/PERDA_3_1969.pdf

SEJARAH KERAJAAN DAN RAJA RAJA SEBELUMNYA

Sebelum berdiri sendiri menjadi sebuah kerajaan, Palu masih dibawah kekuasaan kerajaan Gowa asal Sulawesi Selatan sejak era VOC di tahun 1666. Pada tahun 1796-1960 Kerajaan Palu masih menggunakan sistim pemerintahan monarki, dan ibukota Palu pertama bernama Pandapa (1796-1888), kemudian berganti nama menjadi Panggovia pada 1888-1960, dan saat Republik Indonesia merdeka tahun 1945 pada tahun 1960 kerajaan Palu lengser dan bergabung dengan Indonesia. (Sumber wikipedia)

Kota Palu Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah yang besar ini awalnya dari kesatuan empat buah kampung besar diantaranya : Besusu, Tanggabanggo (Siranindi) sekarang bernama (Kamonji), Panggovia sekarang bernama (Kampung Lere), Boyantongo sekarang bernama (Kelurahan Baru).

Mereka membentuk satu Dewan Adat disebut Patanggota. Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan para pembantunya yang erat hubungannya dengan kegiatan kerajaan. Kerajaan Palu lama-kelamaan menjadi salah satu kerajaan yang dikenal dan sangat berpengaruh.

Berikut nama raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Palu saat itu :

a) Pue Nggari (Siralangi): 1796-1805

Kerajaan Palu saat itu masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Gowa yang berada di Sulawesi Selatan hal itu terlihat dari pemakaian gelar kebangsawanan pada Kerajaan Palu. Gelar-gelar tersebut adalah sebagai berikut :

Magau = Maha Raja; Madika Malolo = Raja Muda atau Pangeran; Madika Matua = Pelaksana Pemerintahan atau Setara dengan Perdana Menteri sekarang; Baligau = Ketua Dewan Adat; Galara = Urusan Kehakiman; Pabisara = Penyampai atau Penerus Perintah dari Raja kepada rakyat; Punggava = Urusan Pertanian dan Perekonomian

Terlihat dari susunan pemerintahan di Kerajaan Palu dapat dikatakan bahwa Kerajaan Palu pada saat itu sudah sangat matang, hal ini yang membuat rakyat mendesak Magau Pue Nggari untuk memisahkan diri dari Kesultanan Gowa untuk bisa mandiri dan tidak lagi harus membayar upeti ke kerajaan lain. Pada saat yang sama di Kerajaan Palu datanglah seorang penyebar Agama Islam dari Sumatera yang bernama Abd. Raqie (Masyarakat Palu umumnya mengenal dengan nama "Dato Karama" Dato artinya Tuan atau Yang Dipertuankan, Karama artinya Keramat, Jadi Dato Karama Adalah "Tuan Yang Di Keramatkan", atau "Orang Keramat", bisa juga "Seseorang yang memiliki ilmu yang sakti") yang di utus oleh Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh.

Kedatangan Abd. Raqie atau Dato Karama ini bertujuan untuk menyebarkan Agama Islam di lembah Palu, yang mana pada saat itu masyarakat Suku Kaili

masih memiliki kepercayaan animisme. Maka berlabuhlah kapal Dato Karama yang turut serta membawa 50 orang muridnya dari Sumatera di pantai Besusu, turut serta istrinya yang bernama Ince Jille, iparnya yang bernama Ince Saharibanong, dan anaknya yang bernama Ince Dingko kedatangan Dato Karama ini disambut baik oleh Keluarga Kerajaan serta rakyat dan langsung menerima tawaran untuk memeluk Agama Islam karena persyaratan Sombarigowa mengatakan, jika ingin melepaskan diri dari wilayah kesultanan Gowa, maka penduduknya harus memeluk Agama Islam. Setelah seluruh persyaratan dari Sombarigowa diterima Pue Nggari maka diadakanlah prosesi sebagai berikut :

Pengislaman terhadap Magau Pue Nggari bersama keluarganya yang dilaksanakan oleh Dato Karama dengan istilah "PoVonju Tevo". Adapun anggota keluarga Pue Nggari yang turut di Islamkan adalah sebagai berikut:

- Vua Pinano (isteri Pertama dari Pue Nggari)
- Lasamaingu (Anak Pertama Pue Nggari)
- Pue Songu (Anak Kedua Pue Nggari) tidak mau di Islamkan
- Andi lana (Anak Ketiga Pue Nggari) bersama isteri dari Tatanga
- Pue Rupia (Anak Keempat Pue Nggari)
- Yenda Bulava (Anak Kelima Pue Nggari), suaminya bernama Bulava Lembah tidak mau di Islamkan dan tidak menerima agama Islam

Setelah persyaratan Sombarigowa dipenuhi semuanya, akhirnya Kerajaan Palu diproklamirkan sebagai kerajaan yang berdiri sendiri dan terlepas dari Kesultanan Gowa.

Namun ada beberapa hal yang dipertahankan antara Kerajaan Palu dan Kesultanan Gowa yaitu jika Kesultanan Gowa menjadi rusuh maka Kerajaan Palu pun ikut menjadi menjadi Susah, sampai Kerajaan Palu membantu untuk menyelesaikan masalah di Kesultanan Gowa. Maka secara tidak langsung Kerajaan Palu harus siap sedia mengirim Pasukan Perang atau mensuplai bahan makanan jika terjadi kerusuhan di Kesultanan Gowa. untuk mendukung perjanjian tersebut maka disusunlah pemerintahan sebagai berikut :

- Magau adalah Pue Nggari
- Madika Malolo keluarga Silalangi Dolo (Dari Istri Kedua Pue Nggari)
- Madika Matua tetap dipegang keluarga di Besusu (Dari Istri Pertama Pue Nggari)
- Baligau dipegang oleh keluarga Tatanga
- Sisanya diatur oleh Pue Nggari sendiri

b) I Dato Labungulili : 1805-1815

Setelah Pue Nggari mangkat, ia digantikan oleh Madika Malolo Labugulili dari keluarga Silalangi Dolo. Keluarga Silalangi menjabat sebagai Madika Malolo pada masa pemerintahan Pue Nggari. Labugulili kemudian di kenal dengan sebutan I Dato Labugulili. Ia merupakan anak Pue Nggari dari istri kedua. I Dato Labugulili merupakan Raja perempuan pertama di Kerajaan Palu ia

memerintah selama kurun waktu antara tahun 1805-1815. Selama masa pemerintahan Labungulili, pusat pemerintahan masih berada di Besusu.

c) Malasigi Bulupalo : 1815-1826

Setelah Labungulili wafat kemudian digantikan oleh Malasigi yang bergelar Malasigi Bulupalo. Malasigi merupakan anak dari Panjororo (Pue Bongo) dengan Dei Bulava. Pue Bongo adalah Raja Di Daerah Bangga (Masuk dalam Wilayah Kerajaan Sigi Biromaru) yang merupakan anak dari Bulava Lembah dan Yenda Bulava. Yenda Bulava merupakan anak dari Pue Nggari dan Pue Puti. itu artinya Malasigi adalah cicit dari Pue Nggari. Malasigi memerintah dalam kurun waktu antara tahun 1815-1826. Pada masa pemerintahannya, pusat Kerajaan Palu tetap berada di Besusu. Tetapi kawasan Panggovia (Kelurahan Lere sekarang) mulai ditempati dan dikembangkan.

d) Daelangi : 1826-1835

Malasigi kemudian digantikan oleh Daelangi dari keluarga Besusu (Keturunan Pue Nggari dari istri pertama Vua Pinano) yang memerintah antara tahun 1826-1835. Daelangi merupakan raja perempuan kedua di Kerajaan Palu.

e) Yololembah : 1835-1850

Kemudian Daelangi digantikan oleh anaknya yang bernama Yololembah yang memerintah selama 15 tahun yaitu antara tahun 1835-1850

f) Lamakaraka (Tondate Dayo) : 1850-1868

Setelah Yololembah, tahta Kerajaan Palu dipegang kembali oleh keluarga Silalangi Dolo (Keturunan Pue Nggari dari istri kedua Pue Puti) yang bernama Lamakaraka. Lamakaraka adalah anak dari Malasigi dan Indjola. Lamakaraka bergelar Madika Tondate Dayo. Lamakaraka mempunyai istri bernama Dei Donggala. Perkawinan ini dikaruniai empat orang anak yaitu: Suralembah, Panundu, Yodjokodi, Bidadari.

Lamakaraka memerintah selama 18 tahun antara 1850-1868. Pada masa pemerintahan Lamakaraka, pusat pemerintahan tetap berada di Besusu.

g) Radja Maili (Mangge Risa) : 1868-1888

Setelah Lamakaraka, yang menduduki tahta Kerajaan Palu adalah Radja Maili (Mangge Risa). Ia merupakan anak dari Suralembah dan merupakan cucu dari Lamakaraka. Raja Maili memerintah selama 20 tahun antara tahun 1868-1888. Pada masa pemerintahan Radja Maili inilah Belanda pertama kali berkunjung ke Palu untuk mendapatkan perlindungan dari Manado pada tahun 1870. Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 1888, Gubernur Belanda untuk Sulawesi berkhianat terhadap Rada Maili yang telah memberi mereka perlindungan, bersama dengan bala tentara dan beberapa kapal tempur, Gubernur Belanda tiba di Kerajaan Palu untuk menyerang

Kayumalue. Radja Maili yang merasa telah dikhianati Belanda tidak tinggal diam, Dia pun mengumpulkan bala tentara untuk menghadapi Belanda yang dipimpin sendiri oleh Radja Maili.

Namun karena perang yang tidak seimbang dari segi persenjataan dan personel akhirnya Pasukan Kerajaan Palu dapat dikalahkan, Kayumalue pun jatuh ketangan Belanda, sedangkan Radja Maili sendiri terbunuh oleh pihak Belanda dan jenazahnya dibawa ke Palu.

Radja Maili mempunyai istri bernama Timamparigi dan seorang putri bernama Mpero (Mpero inilah yang nantinya dinikahkan dengan Idjazah dan melahirkan "Tjatjo Idjazah" Raja Terakhir Palu). Pasa masa pemerintahan Radja Maili pusat Kerajaan Palu masih berada di Besusu.

h) Jodjokodi : 1888-1906

Pada tahun 1888, Radja Maili tewas terbunuh oleh Belanda dalam Perang Kayumalue kemudian tahta kerajaan kembali di pegang oleh pamannya Radja Maili yang bernama Jodjokodi (anak ketiga dari Lamakaraka). Pada tanggal 1 Mei 1888 Raja Jodjokodi di paksa menandatangani perjanjian pendek kepada Pemerintah Hindia Belanda yang tentunya isi perjanjian itu menguntungkan pihak Belanda. Jodjokodi biasa dipanggil dengan sebutan Toma I Sima.

Jodjokodi memerintah selama 18 tahun dari tahun 1888-1906. Setelah empat tahun memerintah tepatnya 1892, Raja Jodjokodi kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Besusu ke daerah Panggovia (Kelurahan Lere) dan sebagian masuk ke dalam wilayah Tanggabanggo (Kelurahan Kamonji) karena merasa Besusu sudah tidak aman lagi berkat kedatangan Belanda.

Pemindahan pusat pemerintahan ini ditandai dengan pembangunan "Souraja" (Istana Kerajaan). Souraja dibangun pada tahun 1892. Pembangunan Souraja dikepalai oleh Hj. Amir Pettalolo, menantu dari Jodjokodi. Dalam pembangunan Souraja, sebagian besar tenaga kerjanya didatangkan dari Banjar sehingga nampak corak Banjar di bangunan tersebut. Souraja digunakan oleh Raja Jodjokodi sebagai tempat tinggal dan pusat pemerintahan.

Raja Jodjokodi memiliki tiga orang istri yang bernama I Ntodei (Ratu Kerajaan Sigi), Bidarawasia (Adik ipar Radja Maili), dan Jabatjina. Dari hasil perkawinan dengan Bidarawasia, Jodjokodi dikaruniai delapan orang anak yaitu: 1) Pariusi; 2) Parampasi; 3) Idjazah; 4) Sima; 5) Pangia; 6) Djamara; 7) Yodi; dan 8) Mutia

i) Parampasi : 1906-1921

Pada tahun 1906, Jodjokodi wafat dan digantikan oleh Parampasi. Pada masa pemerintahan Parampasi, Souraja masih digunakan sebagai tempat tinggal Raja dan sebagai pusat pemerintahan.

Parampasi menikah dengan Hi. Indocenni Pettalolo dan dikaruniai enam orang anak, empat anak perempuan dan dua anak laki-laki. anak-anak Parampasi, Puteri ; Andi Wali Parampasi, Andi Tase Parampasi, Andi Tunru Parampasi, Andi Ratu Parampasi. Putera ; Andi Wawo Parampasi, Tjatjo Kodi Parampasi. Parampasi memerintah selama 15 tahun dalam kurun waktu antara tahun 1906-1921.

j) Idjazah : 1921-1947

Setelah Parampasi wafat, Kerajaan Palu diperintah oleh Idjazah. Idjazah merupakan adik dari Parampasi. Idjazah memerintah antara tahun 1921-1947.

Pada masa pemerintahan Raja Idjazah, Souraja beberapa kali mengalami pergantian fungsi yaitu, pada tahun 1921-1942, Souraja masih digunakan sebagai tempat tinggal raja dan pusat pemerintahan. Pada tahun 1942-1945, tepatnya pada masa pendudukan Jepang, Souraja dialih fungsikan sebagai tangsi militer tentara Jepang walaupun fungsi Souraja masih tetap sebagai kantor pemerintahan Kerajaan Palu.

Pada masa Jepang itu, kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Tengah berubah nama menjadi Suco. Lebih jauh dalam buku "Sejarah daerah Sulawesi Tengah" dijelaskan "kalau pada masa pemerintahan Belanda atasan-atasannya (asisten Residen dan Kontrolieur) orang Belanda, maka pada zaman Jepang kedudukan ini ditempati oleh Jepang, juga raja-raja tetap, hanya namanya diganti memakai istilah Jepang. Raja disebut Suco dan kepala distrik disebut Gunco. Peranannya pun sama pada zaman Hindia Belanda hingga Kemudian pada tahun 1945-1948, Souraja kembali difungsikan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Palu.

k) Djanggola : 1947-1949

Pada tahun 1947, Idjazah digantikan oleh keponakannya Djanggola. Djanggola merupakan anak dari Pariusi, saudara dari Parampasi dan Idjazah. Djanggola merupakan anak kedua dari Pariusi. Djanggola memiliki lima orang saudara yaitu: Baso Pariusi, Itei Pariusi, Djuri Pariusi, Todi Pariusi, dan Todji Pariusi.

Masa pemerintahan Djanggola berlangsung singkat yaitu hanya sekitar dua tahun antara tahun 1947-1949. Pada saat Djanggola memerintah, ia menunjuk pamannya, Palimuri sebagai penasihatnya. Dalam struktur pemerintahannya, Andi Wawo Parampasi menjabat sebagai Madika Matua (Pelaksana Pemerintahan) dan Tjatjo Idjazah sebagai Madika Malolo (Raja Muda). Artinya, bahwa Tjatjo Idjazah telah disiapkan untuk menggantikan Djanggola sebagai Magau Kerajaan Palu.

Pada tahun 1945-1948, Souraja kembali difungsikan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Palu. Tetapi, akibat revolusi fisik yang terjadi antara tahun 1945-1950, memaksa rakyat dan penguasa berjuang di luar jalur pemerintahan kerajaan. Walaupun seorang raja masih menjadi pengendali perjuangan rakyat, tetapi umumnya tidak menggunakan kekuasaannya

sebagai Raja saat turun ke basis-basis perjuangan rakyat. Hal tersebut mengakibatkan Souraja jarang ditempati oleh Magau Djanggola. Selain itu Djanggola juga mendirikan rumahnya sendiri tepat di samping Souraja.

Djanggola menikah dengan anak dari Magau Parampasi yaitu Andi Wali Parampasi. Setelah Andi Wali meninggal, Djanggola menikah lagi dengan adik Andi Wali Parampasi yang bernama Andi Ratu Parampasi. Pernikahan Djanggola dan Andi Ratu Parampasi biasa disebut “tukar tikar”.

Magau Djanggola mempunyai istri 10 orang yaitu Tina Yoto, Daratika, Tina Yodi, Tina Tjinowera, Tina Dg. Mangiri, Tina Raka, Tina Lipa, Tina Dei, Andi Wali Parampasi, dan Andi Ratu Parampasi. dengan anak yang berjumlah enam belas (16) orang.

Salah satu cucu keturunan Magau Djanggola dari istri pertama Tina Yoto bernama Drs. H. Longki Djanggola, M.Si (Sekarang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah dan dilantik atas pemberian Gelar Toma Oge Nungata Kaili (18/06/2011)

1) Tjatjo Idjazah : 1949-1960

Selanjutnya, Djanggola digantikan oleh Tjatjo Idjazah. Tjatjo Idjazah adalah sepupu dari Djanggola. Tjatjo Idjazah merupakan anak dari Magau Idjazah dengan Mpero (anak Magau Radja Maili).

Pada masa pemerintahan Tjatjo Idjazah, Souraja dikembalikan menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Palu. Namun, Magau Tjatjo Idjazah jarang menempati Souraja karena ia lebih sering berada di kediamannya di Besusu (Sekarang Menjadi Apotik Pancar, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Besusu Barat Kota Palu). Hal ini menyebabkan Souraja sering tidak didiami oleh Magau Tjatjo Idjazah.

Pada tahun 1958, ketika Permesta memberontak di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, Souraja hadir dengan fungsi baru sebagai asrama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Souraja dijadikan markas tentara dalam kegiatan Operasi Penumpasan Pemberontakan Permesta di Sulawesi Tengah. Peran ini berlangsung hingga tahun 1960.

Pada tahun 1960, Kerajaan Palu resmi dibubarkan dengan Tjatjo Idjazah sebagai raja terakhirnya. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa Magau Tjatjo Idjazah tidak memiliki keturunan. Selanjutnya, Palu ditetapkan sebagai wilayah Swapraja dengan Andi Wawo Parampasi sebagai Kepala Swaparaja.

Sumber :

- Majalah Kominfo edisi tahun 2021
- <https://sites.google.com/site/gragenews/clients>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah